

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development *Goals* (SDGs) merupakan rancangan target atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator dan harus dicapai pada tahun 2030 dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai Indonesia Inklusif 2030.¹

Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan SDGs. Sebuah indikasi komitmen keseriusan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan mencapai SDGs. Melalui Perpres ini, Presiden Jokowi memimpin langsung langkah dan strategi Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.²

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu

¹ Sustainable Development Goals' <<https://sdgs.bappenas.go.id/>>.

² <https://peraturan.bpk.go.id/details/72974/perpres-no-59-tahun-2017>

menjaga peningkatan kalitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 Tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.³ Dengan dirancangnya tujuan tersebut, setiap negara mempunyai acuan yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan skala prioritas yang ada.

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan.⁴ Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh.

³ 'Sustainable Development Goals' <<https://sdgs.bappenas.go.id/>>.

⁴ Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1.

Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur.

Salah satu faktor permasalahan kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat secara individu.⁵ Terdapat hubungan kausal antara pendidikan dengan pengurangan kemiskinan. Tingginya tingkat pendidikan individu penduduk setidaknya dapat memberikan kesempatan individu untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga mampu meningkatkan konsumsi. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berhubungan dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Pendidikan membantu proses pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karenanya pemerintah menganjurkan masyarakat dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin.

Indeks pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain indeks pendidikan, komponen penyusun IPM adalah Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran.⁶ IPM lebih komprehensif dalam mengukur tingkat keberhasilan dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibandingkan dengan

⁵ Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, 16(01), 1-30.

⁶ Mahendra, R., Fariyanti, A., & Falatehan, A. F. (2016). Strategi peningkatan indeks pendidikan melalui alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 8(2).

indikator Pendapatan Domestik Bruto/ Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) yang hanya mencakup aspek ekonomi saja. Permasalahan yang dihadapi Kota Tasikmalaya adalah indeks pendidikan yang rendah. Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik, indeks pendidikan Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebesar 69,18 dan berada pada posisi ke-8 dari 28 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat. Angka tersebut tergolong rendah dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat.

Selain itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2010 dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menyusun indeks yang berasal dari 24 indikator. Indeks tersebut diberi nama Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat atau dikenal sebagai IPKM. Fungsi IPKM sebagai alat ukur pembangunan kesehatan masyarakat baik di tingkat daerah hingga nasional.⁷ Apabila melihat data yang tertera di Badan Pusat Statistik IPKM Kota Tasikmalaya berada di posisi ke-27 dari seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi tolak ukur maju atau mundurnya suatu daerah, sehingga kedua indeks tersebut menjadi poin penting dan harus diperhatikan oleh pemerintah setempat.

Tasikmalaya merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 723.921 jiwa di tahun 2021. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu tentunya belum semua penduduknya mencapai kesejahteraan dalam berbagai aspek yaitu Ekonomi,

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kementerian Kesehatan R.I. Indeks Pembangunan Kesehatan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2010.

Pendidikan dan Kesehatan.⁸ Kemiskinan saat ini masih terjadi di Kota Tasikmalaya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 angka kemiskinannya sebesar 12,72% dari jumlah penduduk Kota Tasikmalaya. Walaupun angka ini berkurang dari 13,13% pada tahun 2021, namun kota ini menduduki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat dibanding dengan Kota Indramayu.⁹

Kota Tasikmalaya merupakan kota dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Kota Tasikmalaya diharapkan menjadi pioner dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan prinsip yang dibangun oleh ajaran Islam melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya. Kontribusi zakat dalam mewujudkan SDGs didukung dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tercantum di pasal 3 yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan

⁸ Badan Pusat Statistik' <<https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/12/28/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>> [accessed 18 September 2023].

⁹ 'Badan Pusat Statistik' <<https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-penduduk-miskin.html>> [accessed 18 September 2023].

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang NO 23 Tahun 2011, Phys. Rev. E, 2011, p. 24

Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹¹ Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya, merupakan representasi organisasi pengelola zakat resmi, berperan dalam menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di kota Tasikmalaya. Dalam pengelolaannya, dana yang telah terkumpul akan disalurkan pada lima pilar program utama, diantaranya: Tasik Cerdas (Program bidang pendidikan), Tasik Sehat (Program bidang kesehatan), Tasik Peduli (Program bidang Kebencanaan), Tasik Sejahtera (Program bidang ekonomi) dan Tasik Berkarakter (Advokasi dakwah) Dengan perolehan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut untuk laporan keuangan tahun 2017-2022, semakin memantapkan BAZNAS Kota Tasikmalaya, sebagai badan lembaga terpercaya dan akuntabel.

Peran lembaga BAZNAS sangat diperlukan untuk terciptanya

¹¹ 'BAZNAS Kota Tasik' <<https://baznaskotatasik.com/tentang>> [accessed 18 September 2023].

kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga baznas. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidupnya.¹²

Umumnya antara SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah tujuan untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu persatu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kontribusi zakat terhadap SDGs saat ini berfokus pada tujuan yakni:

1) Menghapus Kemiskinan, 2) Mengakhiri kelaparan, 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 4) Pendidikan bermutu. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa disetiap tujuan SDGs merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat.¹³

Adapun program yang menjadi prioritas BAZNAS mencakup lima program, yaitu (1) Kemanusiaan; (2) Kesehatan; (3) Pendidikan dan Dakwah; (4) Kebencanaan; (5) Ekonomi. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, disamping itu pendistribusian dana zakat menjadi potensi yang sangat besar dengan melihat penduduk di

¹² Nine Haryanti, Yini Adicahya, and Rizky Zulfia Ningrum, 'Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat', *Iqtisadiya Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7.14 (2020), 1–10.

¹³ Suchi Fitri Yani, 'PERAN ZAKAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT', *Skripsi*, 2020, 8.

Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama islam sehingga BAZNAS sangat berperan penting dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Berdasarkan pemaparan singkat diatas maka penulis tertarik mengangkat penelitian lebihdalam tentang “*Analisis Peran Zakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals di Kota Tasikmmalaya*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam *Mewujudkan Sustainable Development Goals* (SDGs).

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharap dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut.

1. Akademis

Dilihat dari segi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunnjang ilmu pengetahuan, dan diharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan serta perbandingan untuk penelitian-penelitian dimasa yang akan datang.

2. Praktis

Dilihat dari sisi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan proyeksi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya.

3. Umum

Masyarakat umum dapat mengetahui mengenai Peran BAZNAS Kota Tasikmalaya dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).